



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Laporan

Survei Kepuasan Penyelenggaraan
Kegiatan Pendidikan
Semester I Tahun 2020



**Laporan Survei
Kepuasan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan
Semester I Tahun 2020**

**PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Survei Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2020 Semester 1 telah dapat diselesaikan dengan baik. Laporan survei ini disusun sebagai ikhtiar Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabilitas, bersih dan baik (*good governance*).

Selain itu, sebagai implementasi amanat Reformasi Birokrasi, dimana setiap unit kerja yang berada di kementerian/lembaga negara yang bersentuhan langsung dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) wajib membuat survei kepuasan publik dalam rangka mengukur performa layanan dan sebagai input atau masukan dalam meningkatkan kualitas layanan publik.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang belum selesai dan perlu dilakukan pembenahan, baik dari substansi pendidikan maupun kualitas layanan akomodasi dan fasilitas sarana prasarana yang ada di Pusdik.

Semoga dari laporan survei tahun 2020 semester pertama ini akan tergambarkan dengan jelas dan transparan hal-hal yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam memberikan layanan bagi para peserta atau pemangku kepentingan. Selain itu, secara objektif Pusat Pendidikan Pancasila melalui laporan survei ini juga menyajikan sejauhmana tingkat kepuasan peserta kegiatan, baik dari sisi substansi pendidikan maupun fasilitas sarana prasarana, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang tergambar dari kumpulan hasil kuesioner yang diedarkan sesaat setelah kegiatan. Hal ini menjadi bahan refleksi bagi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam rencana penyelenggaraan pendidikan di masa-masa mendatang.

Akhir kata, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, terutama para peserta yang menjadi inspirasi dan refleksi atas masukan-masukannya, baik kritik, saran, maupun usulan-usulannya demi membuat Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi semakin lebih baik.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Survei ini merupakan salah satu pelaksanaan dari amanat Permenpan Tahun 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dalam Permenpan *a quo*, mewajibkan setiap unit kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat atau pemangku kepentingan wajib mengadakan survei minimal 1 (satu) tahun sekali sebagai upaya transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat pengguna layanan.

Laporan survei tahun 2020 ini disusun untuk semester pertama tahun 2020 (s.d. Juli 2020) yang merupakan laporan periodik dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan. Selain itu, dimana sepanjang medio tahun 2020 ini Pusdik Pancasila dan Konstitusi hanya melaksanakan 3 (tiga) kegiatan dari beberapa kegiatan yang direncanakan, selebihnya untuk kegiatan yang statusnya masih rencana atau terjadwal, dibatalkan sampai dengan batas waktu yang ditentukan kemudian. Hal ini dikarenakan dampak pandemi *Covid-19* yang mewabah tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Seluruh kegiatan yang sifatnya pengumpulan massa secara masif tidak diperkenankan dikarenakan adanya pembatasan jarak fisik dan sosial (*social and physical distancing*), agar wabah *Covid-19* ini tidak meluas penyebarannya dan dapat ditekan jumlah yang terkena.

Laporan survei semester pertama tahun 2020 ini menyajikan beberapa aspek penilaian, dimana menggunakan skala ordinal 1-4, yaitu angka 1 untuk menggambarkan ukuran “sangat buruk”, sementara angka 4 untuk menggambarkan ukuran “sangat baik”. Berikut beberapa aspek tingkat layanan yang diukur selama tiga kali kegiatan berlangsung:

- a) Kualitas Materi Kegiatan Selama Tahun 2020 (3,47 – Sangat Baik);
- b) Kualitas Metode Pendidikan Selama Tahun 2020 (3,48 – Sangat Baik);
- c) Kesesuaian Materi Pendidikan Selama Tahun 2020 (3,28 – Baik);
- d) Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pendidikan Selama Tahun 2020 (3,57 – Sangat Baik);
- e) Kualitas Narasumber Selama Tahun 2020 (3,52 – Sangat Baik);
- f) Kualitas Moderator Selama Tahun 2020 (3,42 – Sangat Baik);
- g) Kualitas Pelayanan Administrasi oleh Panitia (3,57 – Sangat Baik);
- h) Kualitas Sarana dan Prasarana Selama Tahun 2020 (3,60 – Sangat Baik);
- i) Kualitas Jamuan Makanan Selama Tahun 2020 (3,18 – Baik);
- j) Kualitas Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pendidikan (3,66 – Sangat Baik).

Dari 10 (sepuluh) aspek yang disurvei, terdapat dua aspek yang menjadi catatan untuk dapat lebih ditingkatkan, yaitu aspek kesesuaian materi pendidikan dan aspek kualitas jamuan makanan yang masih dalam kategori “Baik”.

Secara keseluruhan, rata-rata penilaian yang diberikan peserta 2020 (semester pertama) adalah **3,47 (Sangat Baik)**. Jika dibandingkan dengan survei tahun sebelumnya di tahun 2019, nilai skala rata-rata 2019 sebesar **3,37 (Baik)**, ini menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan atas kepuasan layanan publik yang diberikan dan hasil masukan saran dan masukan peserta di tahun sebelumnya sudah dilakukan tindak lanjut oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
KATA PENGANTAR	
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GRAFIK	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1. Latar Belakang.....	7
1.2. Dasar Hukum	8
1.3. Tujuan	9
1.4. Sasaran.....	9
1.5. Manfaat	10
BAB II METODOLOGI SURVEI	11
2.1. Definisi dan Jenis Survei.....	11
2.2. Metode dan Komponen Survei	11
2.3. Responden/Populasi Survei	15
2.4. Teknik Pengumpulan Data	15
2.5. Teknik Pengolahan Data.....	17
2.6. Keterbatasan Survei	17
BAB III KARAKTERISTIK RESPONDEN.....	18
3.1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	18
3.2. Responden Berdasarkan Pendidikan.....	19
3.3. Responden Berdasarkan Asal Wilayah.....	19
BAB IV PEMBAHASAN HASIL SURVEI	22
4.1. Tingkat Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	22
4.2. Tingkat Persepsi atas Narasumber dan Moderator.....	26
4.3. Tingkat Layanan Administrasi	29
4.4. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana	30
4.5. Saran, Kritik, dan Komentar dari Peserta Pendidikan	33
4.6. Tindaklanjut Hasil Survei.....	35
BAB V PENUTUP	37
5.1. Kesimpulan	37
5.2. Rekomendasi.....	37
LAMPIRAN SURAT TUGAS TIM PENYUSUNAN SURVEI	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Skala Likert Survei Kepuasan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan	12
Tabel 2. 2. Daftar Kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	17
Tabel 3. 1. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	18
Tabel 3. 2. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Pendidikan	19
Tabel 3. 3. Jumlah Responden Berdasarkan Asal Wilayah	20
Tabel 4. 1. Kualitas Materi Kegiatan	22
Tabel 4. 2. Kualitas Metode Pendidikan.....	23
Tabel 4. 3. Kesesuaian Materi Pendidikan	24
Tabel 4. 4. Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pendidikan.....	25
Tabel 4. 5. Materi Paling Menarik.....	26
Tabel 4. 6. Kualitas Narasumber	27
Tabel 4. 7. Kualitas Moderator	28
Tabel 4. 8. Kualitas Pelayanan Administrasi oleh Panitia	29
Tabel 4. 9. Kualitas Sarana dan Prasarana	30
Tabel 4. 10. Kualitas Jamuan Makanan.....	31
Tabel 4. 11. Kualitas Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pendidikan.....	32
Tabel 4. 12. Saran, Kritik, dan Komentar Peserta Pendidikan	33
Tabel 4. 13. Peringkat Penilaian Komponen Survei Kepuasan Peserta Pendidikan di Pusdik Pancasila dan Kontitusi Tahun 2020	35

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	18
Grafik 3. 2. Responden Berdasarkan Pendidikan.....	19
Grafik 3. 3. Responden Berdasarkan Asal Wilayah	21
Grafik 4. 1. Penilaian Responden Terhadap Kualitas Materi.....	22
Grafik 4. 2. Penilaian Responden Terhadap Kualitas Metode Pendidikan	23
Grafik 4. 3. Kesesuaian Materi Pendidikan dengan Kebutuhan Peserta	24
Grafik 4. 4. Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pendidikan.....	25
Grafik 4. 5. Kualitas Narasumber	27
Grafik 4. 6. Kualitas Moderator	28
Grafik 4. 7. Kualitas Pelayanan Administrasi oleh Panitia	29
Grafik 4. 8. Kualitas Sarana dan Prasarana	30
Grafik 4. 9. Kualitas Jamuan Makanan.....	31
Grafik 4. 10. Kualitas Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pendidikan.....	32

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai *supporting system* memiliki fungsi untuk mendukung Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kedua sistem pendukung tersebut harus memberikan pelayanan tidak hanya kepada 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, namun juga memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat pencari keadilan (*justicia bellen*).

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dalam Pasal 11 ayat (3) huruf h menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi diantaranya yaitu pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Dalam rangka menyelenggarakan fungsi tersebut, maka dibentuklah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang tertuang dalam Pasal 13. Penjabaran secara rinci tentang Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ditegaskan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Bagian Kesebelas Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Pasal 98 sampai dengan Pasal 108.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang merupakan unit kerja eselon II di bawah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama dalam konteks penyelenggaraan pendidikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan akan berbanding lurus dengan keberhasilan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, yang secara langsung akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai Pancasila, Konstitusi, Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, dan Hukum Acara Mahkamah

Konstitusi. Masyarakat yang paham dengan hak-hak konstitusional yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 akan mempertahankan atau memperjuangkan secara konstitusional apabila merasa hak konstitusionalnya dikurangi atau dilanggar karena berlakunya suatu undang-undang. Selanjutnya masyarakat yang paham dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi dan memiliki kemampuan menyusun permohonan, menyampaikan keterangan pihak terkait, menyampaikan keterangan termohon, menyampaikan keterangan lainnya dalam perkara konstitusi, serta kemampuan memanfaatkan sistem informasi penanganan perkara konstitusi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi pasca mengikuti pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tentunya akan mempermudah dan memperlancar proses persidangan di Mahkamah Konstitusi sehingga membantu para hakim menghasilkan kualitas putusan yang bermutu dan implementatif.

Dalam menyelenggarakan pendidikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melakukan survei kepuasan pelayanan kepada peserta pendidikan. Survei ini diperlukan untuk mengetahui seberapa baik penyelenggaraan layanan yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Melalui survei, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berusaha mendengarkan dan memahami kebutuhan para penerima layanan, menggali permasalahan yang mereka hadapi, dan mengetahui tingkat kepuasan maupun ketidakpuasan penerima layanan terhadap penyelenggaraan pelayanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Hasil survei ini menjadi salah satu bahan evaluasi dan penentuan target perbaikan kedepannya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi baik secara individu pegawai maupun organisasi.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan survei kepuasan peserta pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap

Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

- 5) Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- 6) Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

1.3. Tujuan

Survei kepuasan peserta pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bertujuan:

- 1) Menggambarkan respon peserta pendidikan terhadap kualitas atau performa penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- 2) Mengukur tingkat kepuasan peserta pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- 3) Mengidentifikasi pendapat dan masukan peserta pendidikan atas penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- 4) Mengidentifikasi hasil evaluasi tahun sebelumnya yang telah ditindaklanjuti oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- 5) Meningkatkan kualitas atau performa penyelenggaraan pendidikan serta untuk mendapatkan umpan balik (*feedback*) secara berkala atas pencapaian kinerja/ kualitas penyelenggaraan pendidikan.

1.4. Sasaran

Adapun sasaran dari survei kepuasan peserta pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah:

- 1) Mendorong partisipasi peserta pendidikan untuk menilai kinerja Pusat Pendidikan

Pancasila dan Konstitusi;

- 2) Mendorong Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan kualitas atau performa penyelenggaraan pendidikan;
- 3) Mendorong Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi lebih efektif dan inovatif dalam menyelenggarakan pendidikan.

1.5. Manfaat

Sedangkan manfaat dari survei kepuasan peserta pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah:

- 1) Mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pendidikan;
- 2) Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil survei;
- 3) Mengetahui indeks kepuasan peserta pendidikan secara menyeluruh terhadap pendidikan yang telah diselenggarakan;
- 4) Mengetahui gambaran tentang kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

BAB II METODOLOGI SURVEI

2.1. Definisi dan Jenis Survei

Survei adalah salah satu metode penelitian ilmiah yang paling banyak digunakan. Sebagai metode penelitian, survei mengumpulkan data dari subjek yang menanggapi serangkaian pertanyaan tentang perilaku dan pendapat dalam bentuk kuesioner. Format survei standar memungkinkan anonimitas responden sehingga mereka dapat mengekspresikan sikap dan pendapat pribadi dengan bebas.

William Laurence Neuman (2006) mengemukakan bahwa survei adalah teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada responden. Dalam penelitian survei, peneliti meneliti karakteristik atau hubungan sebab akibat antar variabel tanpa intervensi. Survei pada umumnya dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam. Sementara itu, Diana Kendall menggambarkan survei sebagai berikut:

“Researchers frequently select a representative sample (a small group of respondents) from a larger population (the total group of people) to answer questions about their attitudes, opinions, or behavior” (Kendall 2006:31).

Menurut Babbie (1982), ada tiga langkah penting yang menentukan keberhasilan penelitian survei, yaitu:

- 1) mengembangkan atau membuat angket,
- 2) memilih sampel, dan
- 3) mengumpulkan data dengan wawancara atau angket.

Dalam survei, terdapat populasi (keseluruhan orang yang menjadi target penelitian) dan sampel (sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili populasi). Penentuan sampel (*sampling*) diperlukan karena adanya kesulitan menjadikan seluruh orang dalam populasi sebagai responden sehingga peneliti perlu mengambil sampel agar pengukuran bisa dilaksanakan. Namun dalam survei yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, pengambilan sampel sebagai calon responden tidak diperlukan karena **responden adalah seluruh peserta pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2020** (keseluruhan populasi peserta pendidikan).

2.2. Metode dan Komponen Survei

Metode yang digunakan dalam survei ini adalah kuantitatif dengan dua tipe instrumen kuesioner, yaitu menggunakan pertanyaan tertutup dan terbuka. Kuesioner pada bagian pertanyaan tertutup digunakan untuk mengetahui sikap dan pendapat

responden mengenai kualitas pelayanan yang diberikan. Sementara itu, pertanyaan terbuka pada bagian kritik dan saran dalam kuesioner digunakan untuk menghimpun opini secara lebih mendalam/kualitatif yang tidak didapatkan dari pertanyaan tertutup. Cara ini digunakan karena mampu mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2013). Pengukuran dalam kuesioner sendiri menggunakan skala *Likert* dengan empat gradasi kategori, yaitu:

Tabel 2. 1. Skala Likert Survei Kepuasan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan

Skala	Kategori
1 – 1,7	Buruk
1,8 – 2,5	Cukup
2,6 – 3,3	Baik
3,4 - 4	Sangat Baik

Selain itu, komponen survei yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terdiri dari:

2.2.1. Tingkat Penilaian Pelaksanaan Kegiatan

Komponen ini terdiri dari empat kategori, yaitu:

1) Kualitas Materi

Syarat minimal penyajian materi yang diberikan oleh narasumber dengan berbagai media penyajian.

2) Metode Pendidikan

Kesesuaian metode pendidikan dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai.

3) Kesesuaian Materi Pendidikan dengan Kebutuhan Peserta

Materi pendidikan yang diberikan bukan materi yang tidak relevan dan aktual tetapi materi yang mampu menjawab kebutuhan aktual peserta pendidikan.

4) Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pendidikan

Menilai apakah panitia, moderator, narasumber dan seluruh pihak terkait tepat waktu dalam keseluruhan penyelenggaraan pendidikan.

Komponen ini menjadi basis evaluasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kualitas materi, metode pendidikan, kesesuaian materi dan ketepatan waktu penyelenggaraan kegiatan. Peserta pendidikan sebagai responden memberikan tanggapan terhadap keseluruhan materi yang disampaikan narasumber, cara penyajian materi, hingga kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta. Selain itu, ketepatan

waktu juga menjadi poin penilaian sebagai upaya menumbuhkembangkan budaya menghargai waktu di lingkungan Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Semua ini menjadi prasyarat akan terselenggaranya pendidikan yang berkualitas tinggi demi meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga negara.

2.2.2. Tingkat Persepsi atas Narasumber dan Moderator

Komponen ini terdiri dari empat kategori, yaitu:

1) Materi Paling Menarik dan Kurang Menarik

Menilai favorabilitas peserta terhadap masing-masing materi yang diberikan sebagai indikasi materi paling relevan dan aktual bagi peserta pendidikan.

2) Kualitas Narasumber

Menilai kualitas penyampaian materi narasumber yang bisa dilihat dari teknik penyajian materi, kualitas memberikan penjelasan atas pertanyaan peserta dan ketepatan waktu narasumber.

3) Kualitas Moderator

Menilai kualitas moderator sebagai basis perbaikan performa moderator yang akan datang.

4) Narasumber Paling Menarik dan Moderator Paling Menarik

Berbeda dengan poin no 1 (materi paling menarik/kurang menarik), poin ini menilai favorabilitas peserta terhadap narasumber dan moderator paling menarik sebagai indikasi akan sosok narasumber dan moderator yang berkualitas bagi peserta pendidikan.

Secara keseluruhan, komponen di atas menilai persepsi peserta terhadap narasumber dan moderator. Peserta kegiatan akan diminta tanggapannya mengenai materi yang paling menarik, dan sebaliknya, materi yang kurang menarik. Peserta juga dimintai tanggapannya mengenai kualitas narasumber pendidikan, apakah sudah cukup baik atau masih perlu perbaikan. Selain itu, ada penilaian terhadap kualitas moderator yang menentukan jalannya sesi materi dan diskusi secara keseluruhan. Terakhir, ada penilaian terhadap narasumber dan moderator paling menarik bagi peserta yang menjadi indikasi favorabilitas peserta terhadap narasumber dan moderator.

2.2.3. Tingkat Layanan Administrasi

Berbeda dengan dua komponen sebelumnya yang menilai kualitas materi dan narasumber kegiatan, komponen ketiga berfokus pada upaya evaluasi atas tingkat layanan administrasi kegiatan. Peserta pendidikan sebagai responden dimintai tanggapannya terhadap empat hal terkait pelayanan, yaitu:

1) Aksesibilitas informasi yang terkait dengan kegiatan

Apakah informasi terkait pedoman, jadwal dan mekanisme terkait kegiatan aksesibel atau tidak.

2) Penyelenggara melayani peserta dengan ramah

Unsur keramahan penyelenggara menjadi penilaian sebagai upaya pelayanan prima (*service excellence*) terhadap peserta pendidikan. Di samping itu, sikap ramah juga terus diupayakan agar peserta pendidikan merasa nyaman selama menjalani pendidikan di lingkungan Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

3) Pelayanan administrasi kegiatan dapat diselesaikan dengan baik

Poin ini menilai bagaimana kualitas keseluruhan pelayanan, mulai dari awal (registrasi) hingga akhir (pembagian sertifikat) kegiatan.

4) Pelayanan administrasi keuangan dapat diselesaikan dengan baik

Poin ini khusus menilai pada pelayanan administrasi keuangan yang menjadi hak dan kewajiban bagi peserta pendidikan untuk dipatuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.4. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana

Komponen terakhir menilai kualitas layanan sarana dan prasarana di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Di dalamnya terdapat empat penilaian, yaitu:

1) Kualitas Sarana dan Prasarana

Menilai kualitas ruang kelas dan aula beserta seluruh fasilitas pendukungnya, mulai dari *sound system*, LCD proyektor, kenyamanan dan kebersihan ruangan, hingga penerangan yang dapat menunjang terlaksananya pendidikan dengan baik.

2) Kualitas Jamuan Makanan

Menilai kualitas konsumsi yang diberikan kepada peserta sebagai basis evaluasi terhadap penyedia jasa konsumsi. Selain itu, kualitas makanan yang baik akan meningkatkan kenyamanan peserta dalam mengikuti jalannya pendidikan.

3) Kualitas Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Pusdik Pancasila dan Konstitusi

Mengukur bagaimana persepsi peserta terhadap keamanan dan kenyamanan peserta. Evaluasi ini penting sebagai basis pengambilan kebijakan terkait keamanan dan kenyamanan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Di samping itu, keamanan dan kenyamanan yang baik akan mendorong terselenggaranya kegiatan pendidikan yang berkualitas.

2.2.5. Saran dan Kritik dari Peserta

Selain keempat komponen di atas yang kuantitatif sifatnya, evaluasi secara kualitatif juga dilakukan dengan memberikan ruang bagi peserta memberikan saran dan kri-

tik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Panitia perlu mendengar lebih mendalam (*depthness*) akan aspirasi dan opini peserta yang hanya bisa tertampung dalam bentuk kualitatif, yang tersedia dalam kolom saran dan kritik. Disini, peserta diberikan kebebasan untuk memberikan saran dan kritik yang diharapkan menjadi basis pengambilan kebijakan yang mengubah yang kurang baik menjadi lebih baik, yang kurang nyaman menjadi lebih nyaman, dan yang kurang berkualitas menjadi jauh lebih berkualitas.

2.3. Responden/Populasi Survei

Responden yang menjadi populasi dalam survei ini adalah seluruh peserta kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara/Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Tahun 2020.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam survei ini menggunakan kuesioner. Ada dua tipe kuesioner dalam survei ini yaitu kuesioner tertutup (mengukur pendapat terhadap kualitas pelayanan) dan terbuka (memberikan ruang untuk kritik dan saran). Responden diberikan kesempatan untuk secara bebas memberikan tanggapannya terhadap setiap pertanyaan di kuesioner sesaat sebelum penutupan kegiatan.

Survei ini dilakukan dengan cara daring (*online survey*). Pengumpulan data dalam survei daring dilakukan dengan menggunakan laman (sistem terintegrasi e-Pusdik). Responden yang menjadi populasi survei mengisi kuesioner setelah *login* ke dalam akun yang telah diberikan dan bisa diakses dengan **QR code** yang ada di nametag masing-masing peserta.

Keuntungan dalam penggunaan survei daring ini adalah memudahkan peneliti dan responden dalam pelaksanaannya. Dengan terkumpulnya data di server, survei daring juga mempercepat pengolahan data yang akan dilaksanakan setelah pengumpulan data karena cara ini memungkinkan pengolahan dan penyajian data dilakukan dengan lebih cepat (*real time*), mudah dan efisien.

Selain itu, survei ini juga menghemat penggunaan kertas (*paperless*) sehingga jauh lebih efisien dibanding survei konvensional berbasis lembar angket. Hal ini dilakukan sejalan dengan komitmen Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mengedepankan prinsip *green office* dalam seluruh pelaksanaan tugasnya. Berikut adalah tampilan survei *online* di akun masing-masing peserta pendidikan:

Penilaian oleh Peserta					
NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Materi relevan dengan isu aktual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi pendidikan merupakan isu yang problematis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Materi pendidikan meningkatkan keterampilan menyampaikan pendapat secara lisan (komunikasi oral)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Materi pendidikan meningkatkan kemampuan untuk bekerja dalam tim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Waktu penyelenggaraan kegiatan mencukupi kebutuhan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.	Penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan tepat waktu	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8.	Materi yang paling menarik	<input type="text" value="Pilih Materi"/>			
	Materi yang kurang menarik	<input type="text" value="Pilih Materi"/>			
Peran Narasumber dan Moderator					
9.	Narasumber mampu memberikan informasi yang jelas untuk mencapai hasil terbaik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10.	Narasumber mampu memberikan jawaban yang obyektif terhadap peserta didik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11.	Moderator mampu mengarahkan setiap kegiatan pendidikan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12.	Fasilitator yang paling menarik :				
	A. Narasumber	<input type="text" value="Pilih Narsum"/>			
	B. Moderator	<input type="text"/>			
Administrasi					
13.	Informasi yang terkait dengan kegiatan (jadwal, peserta, dsb) dapat diakses dengan mudah	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14.	Penyelenggara atau panitia melayani peserta dengan ramah	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15.	Pelayanan administrasi kegiatan dapat diselesaikan dengan baik oleh penyelenggara/panitia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
16.	Pelayanan administrasi keuangan dapat diselesaikan dengan baik oleh penyelenggara/panitia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sarana dan Prasarana					
17.	Fasilitas sarana dan prasarana (ruang kelas dan aula, sound system, LCD proyektor, kenyamanan ruangan, penerangan, dll) dapat menunjang kegiatan dengan baik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
18.	Menu makanan yang diberikan sesuai dengan harapan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
19.	Peserta merasa aman dilingkungan Pusdik MK	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
20.	Peserta merasa nyaman dengan kebersihan lingkungan gedung Pusdik MK	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
21.	Secara umum, berikan pendapat anda mengenai keseluruhan pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara/panitia	SKOR:	<input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 9		
Saran dan Perbaikan					
1.	<input type="text"/>				

Pada pelaksanaan survei yang dilakukan pada tahun 2020 ini, populasi sekaligus responden yang dijadikan target survei adalah seluruh peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (1 Kegiatan) dan peserta kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (2 kegiatan), yaitu:

Tabel 2. 2. Daftar Kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

No	Jadwal	Nama Kegiatan
1	Rabu – Jumat 26 – 28 Februari	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Forum Komunikasi MGMP PPKN Jawa Barat
2	Senin – Kamis 2 – 5 Maret	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)
3	Selasa – Jumat 10 – 13 Maret	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)

2.5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan tiga tahap, yaitu penyuntingan (*editing*), pengkodean (*coding*), dan tabulasi (*tabulating*). Pertama, dilakukan penyuntingan terhadap kesesuaian jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan dan kelengkapan pengisian daftar pertanyaan. Disini, jawaban responden belum ditafsirkan dan dibiarkan sebagaimana adanya. Kedua, tahap pengkodean dilakukan dengan memberikan nilai terhadap masing-masing kategori jawaban yang bersifat tertutup, mulai dari jawaban 1 (sangat buruk), 2 (buruk), 3 (baik), dan 4 (sangat baik). Ketiga, penyusunan dan penghitungan terhadap data hasil pengkodean disajikan dalam bentuk tabel yang memperlihatkan keseluruhan gambaran data.

Langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis statistika deskriptif untuk menjelaskan data secara apa adanya tanpa memberikan penilaian terhadapnya. Setelah tahap analisis statistika deskriptif, dilakukan penafsiran atas hasil analisis tersebut yang berguna untuk menarik kesimpulan terhadap survei yang telah dilaksanakan.

2.6. Keterbatasan Survei

Survei ini menjadikan seluruh peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara/Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagai populasi survei. Idealnya, seluruh peserta kegiatan mengisi seluruh kuesioner yang diberikan. Namun, pada kenyataannya ada sebagian responden yang tidak mengisi kuesioner disebabkan berbagai hal. Hal ini menjadi keterbatasan karena survei tidak menjangkau target keseluruhan populasi.

BAB III

KARAKTERISTIK RESPONDEN

Karakteristik responden digunakan untuk mengetahui keragaman responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, dan asal wilayah. Hal ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi responden dengan lebih mendalam terkait survei ini.

3.1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

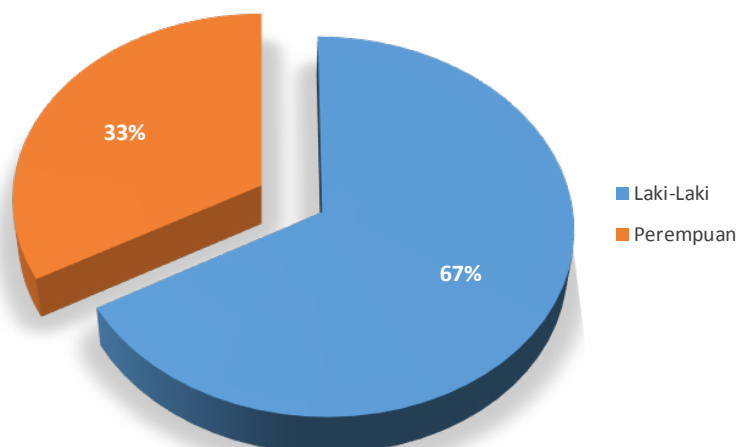
Keragaman responden berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 1. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	293	67%
Perempuan	145	33%
Total	438	100%

Berdasarkan karakteristik jenis kelamin responden pada tabel 3.1 tersebut, terlihat bahwa responden laki-laki sebanyak 293 orang dengan presentase sebesar 66,9% dan responden perempuan sebanyak 145 orang dengan presentasi sebesar 33,1%.

Grafik 3. 1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



3.2. Responden Berdasarkan Pendidikan

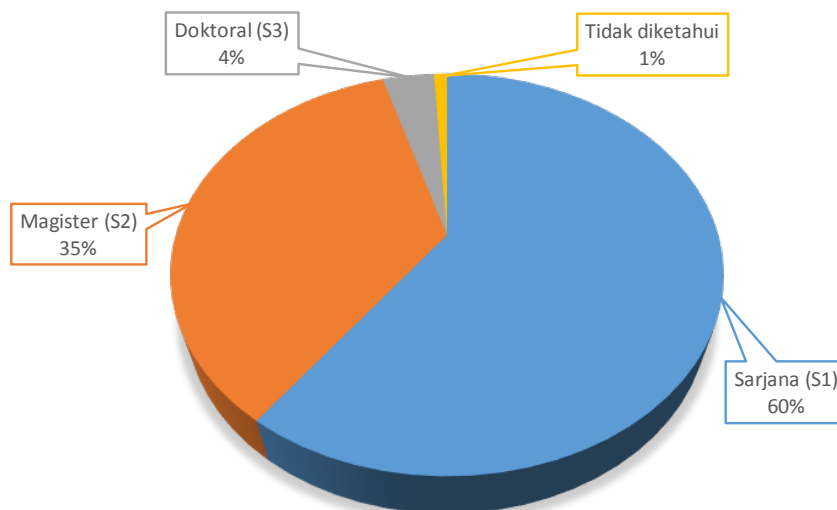
Keragaman responden berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 2. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Sarjana (S1)	263	60%
2	Magister (S2)	155	35,4%
3	Doktoral (S3)	16	3,7%
4	Tidak diketahui	4	0,9%
Jumlah		438	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan responden didominasi oleh responden dengan pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 60%, diikuti pendidikan Magister (S2) sebanyak 35,4%, pendidikan Doktoral (S3) sebanyak 3,7%. Karena keterbatasan data, responden sebanyak 0,9% atau 4 orang tidak diketahui latar belakang pendidikannya.

Grafik 3. 2. Responden Berdasarkan Pendidikan



3.3. Responden Berdasarkan Asal Wilayah

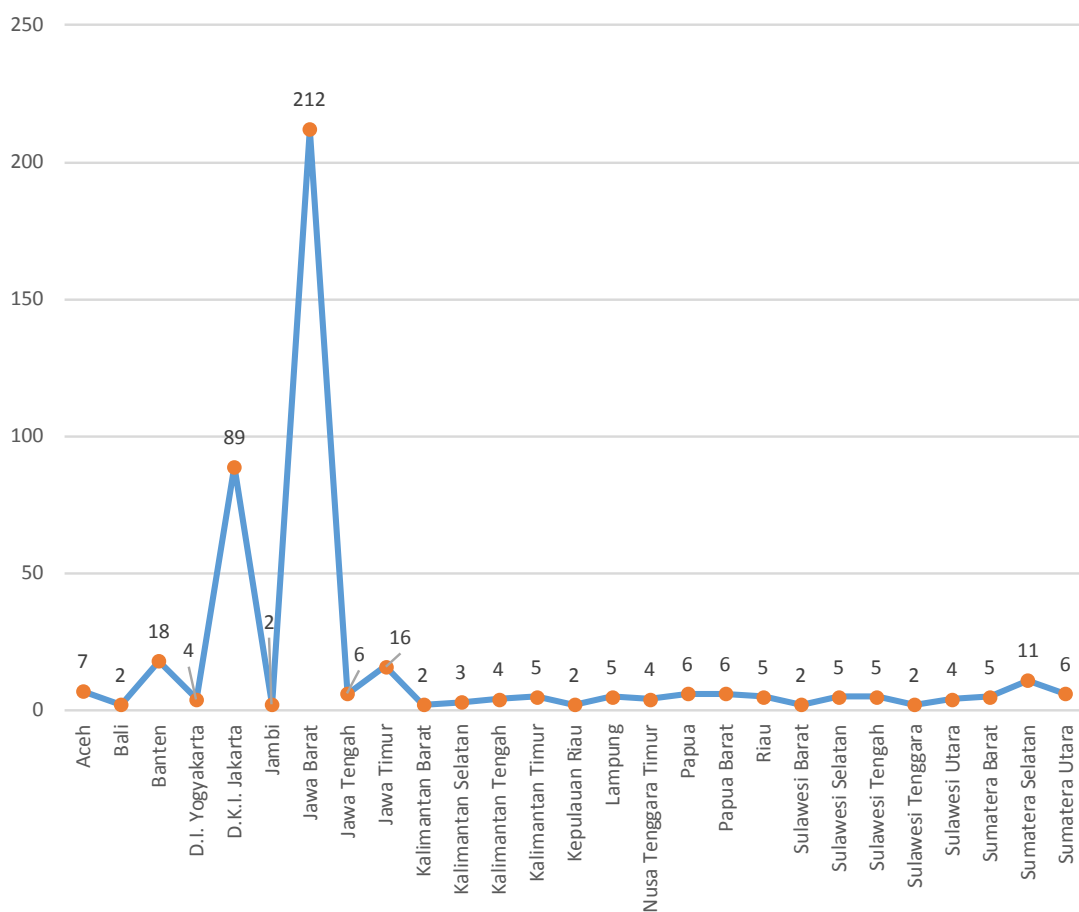
Responden berdasarkan asal wilayah dibagi berdasarkan provinsi masing-masing responden menetap. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemetaan responden secara komprehensif dan melihat kekhususan wilayah tertentu.

Tabel 3. 3. Jumlah Responden Berdasarkan Asal Wilayah

No	Asal Provinsi	Jumlah Responden
1	Aceh	7
2	Bali	2
3	Banten	18
4	D.I. Yogyakarta	4
5	D.K.I. Jakarta	89
6	Jambi	2
7	Jawa Barat	212
8	Jawa Tengah	6
9	Jawa Timur	16
10	Kalimantan Barat	2
11	Kalimantan Selatan	3
12	Kalimantan Tengah	4
13	Kalimantan Timur	5
14	Kepulauan Riau	2
15	Lampung	5
16	Nusa Tenggara Timur	4
17	Papua	6
18	Papua Barat	6
19	Riau	5
20	Sulawesi Barat	2
21	Sulawesi Selatan	5
22	Sulawesi Tengah	5
23	Sulawesi Tenggara	2
24	Sulawesi Utara	4
25	Sumatera Barat	5
26	Sumatera Selatan	11
27	Sumatera Utara	6

Berdasarkan tabel 3.3. di atas, dapat diketahui bahwa responden tersebar pada 27 provinsi di Indonesia. Provinsi Jawa Barat dengan responden sebanyak 212 orang menjadi provinsi dengan jumlah responden terbesar. Hal ini terjadi karena salah satu kegiatan yaitu Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Forum Komunikasi MGMP PPKN Jawa Barat merupakan kegiatan yang keseluruhan pesertanya berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat. Di samping itu, terdapat 7 dari 34 provinsi di Indonesia yang tidak memiliki perwakilan sebagai responden.

Grafik 3. 3. Responden Berdasarkan Asal Wilayah



BAB IV PEMBAHASAN HASIL SURVEI

4.1. Tingkat Penilaian Pelaksanaan Kegiatan

4.1.1. Kualitas Materi

Dari 3 kegiatan yang disurvei sepanjang tahun 2020, pada Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Pusdik MK mendapatkan penilaian Kualitas Materi paling rendah menurut peserta yaitu 3,40 atau sama dengan nilai “sangat baik”. Sementara penilaian Kualitas Materi paling tinggi menurut peserta yaitu 3,58 atau sama dengan nilai “sangat baik” pada pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi MGMP Jawa Barat. Dengan demikian, nilai rata-rata Kualitas Materi adalah 3,47 atau sama dengan nilai “sangat baik”. Adapun hasil jawaban kuesioner kualitas materi setiap kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.

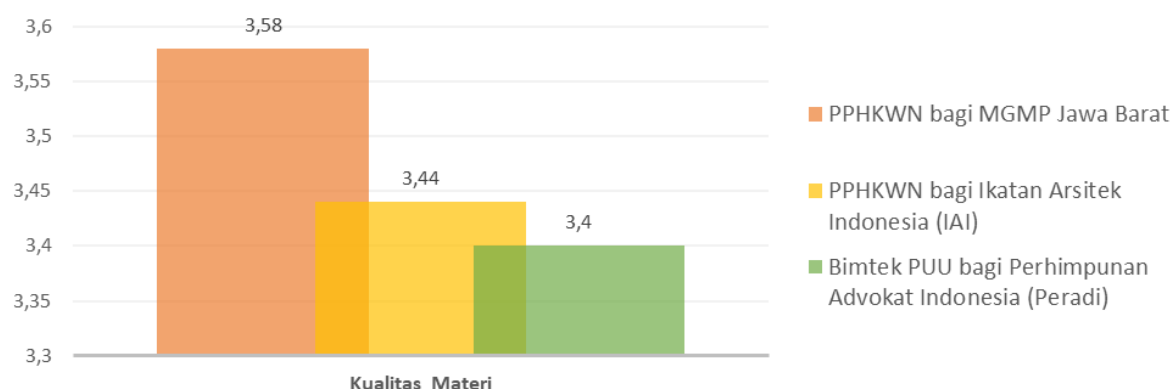
Tabel 4. 1. Kualitas Materi Kegiatan Selama Tahun 2020

No	Nama Kegiatan	Nilai Rata-Rata	Kategori
1	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Forum Komunikasi MGMP PPKN Jawa Barat	3,58	Sangat Baik
2	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)	3,44	Sangat Baik
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	3,40	Sangat Baik
Rata-Rata		3,47	Sangat Baik

Sumber Data: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik 4. 1. Penilaian Responden Terhadap Kualitas Materi



4.1.2. Kualitas Metode Pendidikan

Dari 3 kegiatan yang disurvei pada tahun 2020, Metode Pendidikan mendapatkan nilai paling rendah yaitu 3,32 atau sama dengan “baik” pada Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Sementara penilaian Metode Pendidikan paling tinggi menurut peserta yaitu 3,57 atau sama dengan nilai “sangat baik” pada pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi MGMP Jawa Barat. Dengan demikian, nilai rata-rata Metode Pendidikan berdasarkan hasil survei adalah 3,48 atau sama dengan nilai “sangat baik”. Adapun hasil jawaban kuesioner metode pendidikan setiap kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.

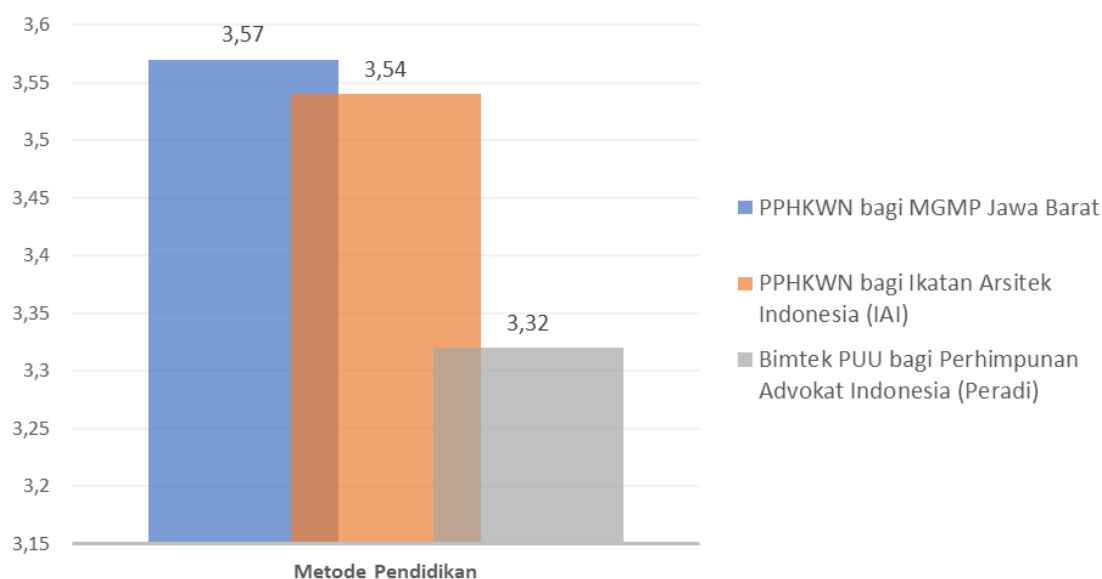
Tabel 4. 2. Kualitas Metode Pendidikan Selama Tahun 2020

No	Nama Kegiatan	Nilai Rata-Rata	Kategori
1	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Forum Komunikasi MGMP PPKN Jawa Barat	3,57	Sangat Baik
2	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)	3,54	Sangat Baik
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	3,32	Baik
Rata-Rata		3,48	Sangat Baik

Sumber Data: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik 4. 2. Penilaian Responden Terhadap Kualitas Metode Pendidikan



4.1.3. Kesesuaian Materi Pendidikan dengan Kebutuhan Peserta

Dari 3 kegiatan yang disurvei pada tahun 2020, Kesesuaian Materi Pendidikan dengan Kebutuhan Peserta mendapatkan nilai paling rendah yaitu 3,23 atau sama dengan “baik” pada Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi MGMP Jawa Barat. Sementara penilaian Kesesuaian Materi Pendidikan dengan Kebutuhan Peserta paling tinggi menurut peserta yaitu 3,35 atau sama dengan nilai “baik” pada pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Dengan demikian, nilai rata-rata Kesesuaian Materi Pendidikan dengan Kebutuhan Peserta berdasarkan hasil survei adalah 3,28 atau sama dengan “baik”. Adapun hasil jawaban kuesioner kesesuaian materi pendidikan dengan kebutuhan peserta setiap kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.

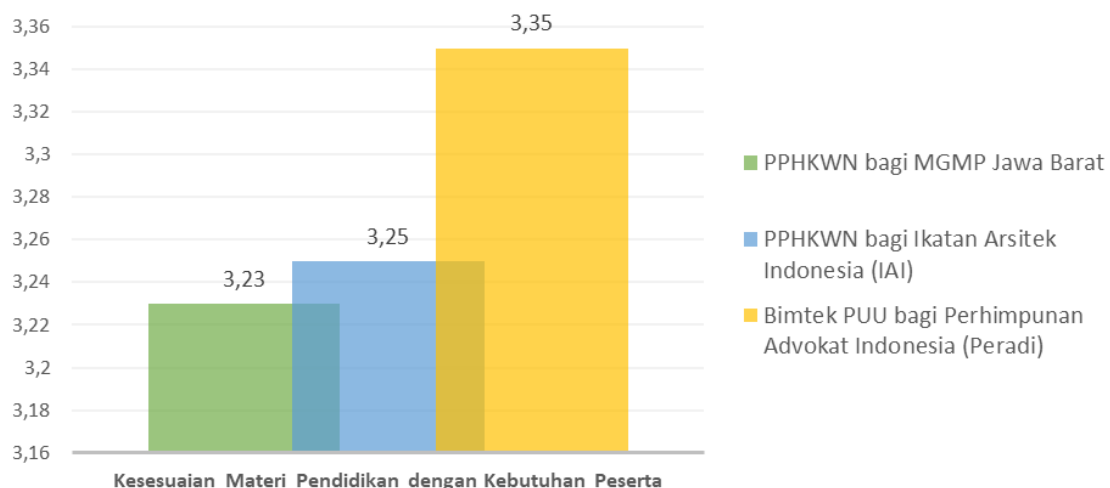
Tabel 4. 3. Kesesuaian Materi Pendidikan Selama Tahun 2020

No	Nama Kegiatan	Nilai Rata-Rata	Kategori
1	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Forum Komunikasi MGMP PPKN Jawa Barat	3,23	Baik
2	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)	3,25	Baik
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	3,35	Baik
Rata-Rata		3,28	Baik

Sumber Data: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik 4. 3. Kesesuaian Materi Pendidikan dengan Kebutuhan Peserta



4.1.4. Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai rata-rata Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan hasil survei adalah 3,57 atau sama dengan “**sangat baik**”. Dari 3 kegiatan yang disurvei pada tahun 2020, Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pendidikan mendapatkan nilai paling rendah yaitu 3,55 atau sama dengan “**sangat baik**” pada Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Sementara penilaian Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pendidikan paling tinggi menurut peserta yaitu 3,59 atau sama dengan nilai “**sangat baik**” pada pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi MGMP Jawa Barat. Adapun hasil jawaban kuesioner ketepatan waktu penyelenggaraan pendidikan setiap kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.

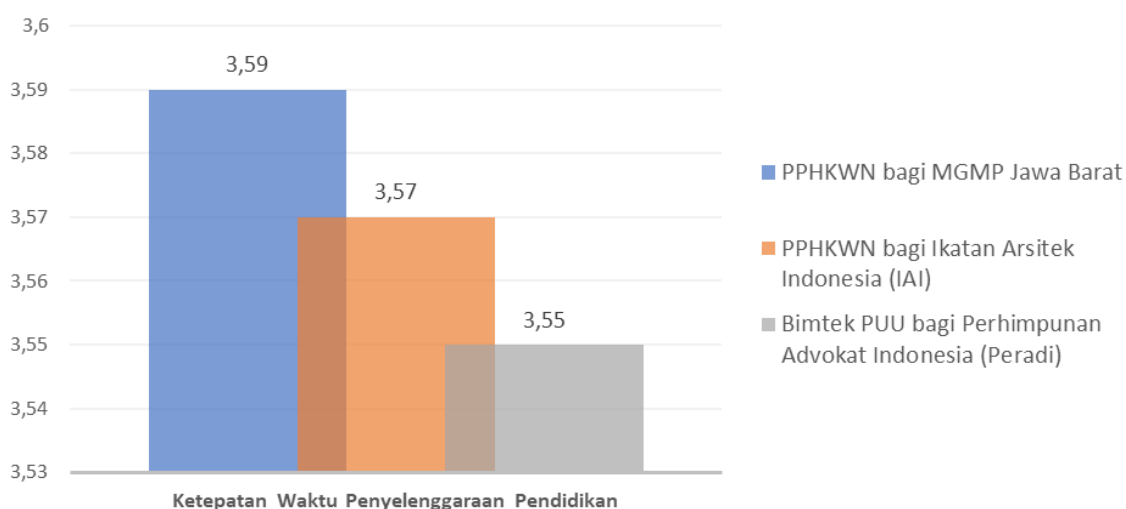
Tabel 4. 4. Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pendidikan Selama Tahun 2020

No	Nama Kegiatan	Nilai Rata-Rata	Kategori
1	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Forum Komunikasi MGMP PPKN Jawa Barat	3,59	Sangat Baik
2	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)	3,57	Sangat Baik
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	3,55	Sangat Baik
Rata-Rata		3,57	Sangat Baik

Sumber Data: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik 4. 4. Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pendidikan



4.2. Tingkat Persepsi atas Narasumber dan Moderator

4.2.1. Materi Paling Menarik

Materi Paling Menarik berdasarkan hasil survei dari 3 kegiatan pada tahun 2020 adalah materi tentang **Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945**. Adapun hasil jawaban kuesioner terkait materi paling menarik setiap kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 5. Materi Paling Menarik Selama Tahun 2020

No	Nama Kegiatan	Materi Paling Menarik
1	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Forum Komunikasi MGMP PPKN Jawa Barat	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945
2	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)	
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	Praktek Penyusunan Permohonan/dan Jawaban Termohon/dan Keterangan Pihak Terkait

Sumber Data: Data Primer diolah, 2020

4.2.2. Kualitas Narasumber

Nilai rata-rata Kualitas Narasumber adalah 3,52 atau sama dengan nilai “**sangat baik**”. Dari 3 kegiatan yang disurvei sepanjang tahun 2020, pada Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Pusdik MK mendapatkan penilaian Kualitas Narasumber paling rendah menurut peserta yaitu 3,39 atau sama dengan nilai “**baik**”. Sementara penilaian Kualitas Narasumber paling tinggi menurut peserta yaitu 3,62 atau sama dengan nilai “**sangat baik**” pada pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi MGMP Jawa Barat. Adapun hasil jawaban kuesioner Kualitas Narasumber setiap kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.

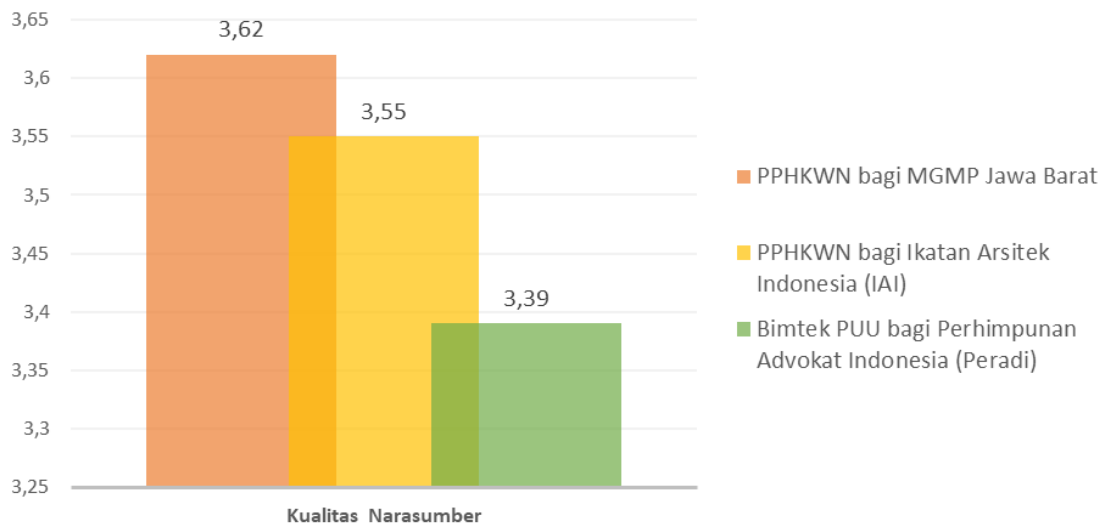
Tabel 4. 6. Kualitas Narasumber Selama Tahun 2020

No	Nama Kegiatan	Nilai Rata-Rata	Kategori
1	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Forum Komunikasi MGMP PPKN Jawa Barat	3,62	Sangat Baik
2	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)	3,55	Sangat Baik
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	3,39	Baik
Rata-Rata		3,52	Sangat Baik

Sumber Data: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik 4. 5. Kualitas Narasumber Selama Tahun 2020



4.2.3. Kualitas Moderator

Nilai rata-rata Kualitas Moderator adalah 3,42 atau sama dengan nilai “**sangat baik**”. Dari 3 kegiatan yang disurvei sepanjang tahun 2020, pada Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Pusdik MK mendapatkan penilaian Kualitas Moderator paling rendah menurut peserta yaitu 3,36 atau sama dengan nilai “**baik**”. Sementara penilaian Kualitas Moderator paling tinggi menurut peserta yaitu 3,51 atau sama dengan nilai “**sangat baik**” pada pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi MGMP Jawa Barat. Adapun hasil jawaban kuesioner Kualitas Moderator setiap kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.

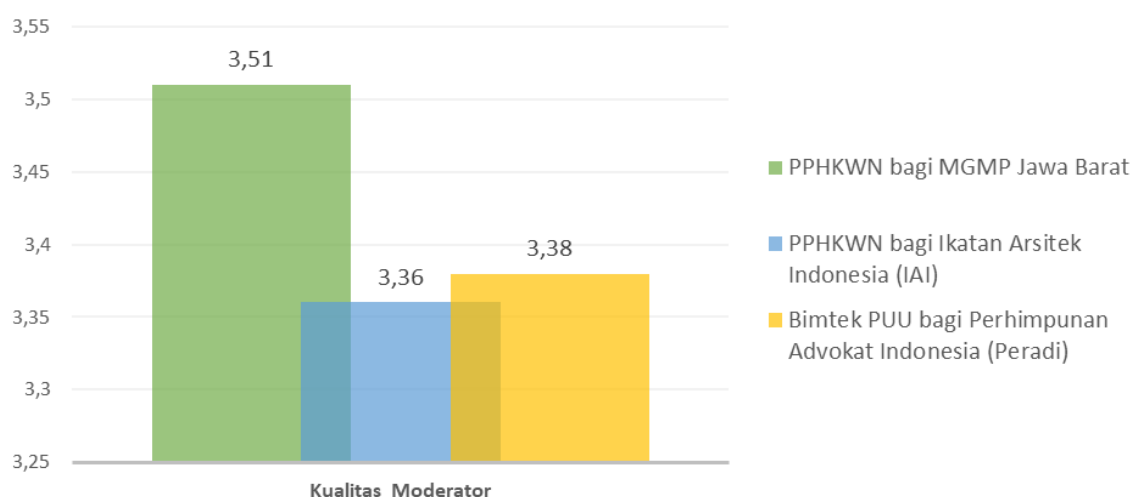
Tabel 4. 7. Kualitas Moderator Selama Tahun 2020

No	Nama Kegiatan	Nilai Rata-Rata	Kategori
1	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Forum Komunikasi MGMP PPKN Jawa Barat	3,51	Sangat Baik
2	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)	3,36	Baik
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	3,38	Baik
Rata-Rata		3,42	Sangat Baik

Sumber Data: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik 4. 6. Kualitas Moderator Selama Tahun 2020



4.2.3. Narasumber Paling Menarik dan Moderator Paling Menarik

3 Narasumber paling menarik menurut peserta selama tahun 2020:

1. Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H.,M.H.
2. P Dr. A. Irman Putrasidin, S.H., M.H.
3. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

2 Moderator paling menarik menurut peserta selama tahun 2020:

1. Imam Margono
2. Nanang Subekti

4.3. Tingkat Layanan Administrasi

4.3.1. Kualitas Pelayanan Administrasi oleh Panitia

Dari 3 kegiatan yang disurvei sepanjang tahun 2020, pada Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Pusdik MK mendapatkan nilai Kualitas Pelayanan Administrasi oleh Panitia paling rendah menurut peserta yaitu 3,49 atau sama dengan nilai “**sangat baik**”. Sementara nilai Kualitas Pelayanan Administrasi oleh Panitia paling tinggi menurut peserta yaitu 3,67 atau sama dengan nilai “**sangat baik**” pada pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi MGMP Jawa Barat. Dengan demikian, nilai rata-rata Kualitas Pelayanan Administrasi oleh Panitia adalah 3,57 atau sama dengan nilai “**sangat baik**”. Adapun hasil jawaban kuesioner Kualitas Pelayanan Administrasi oleh Panitia setiap kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.

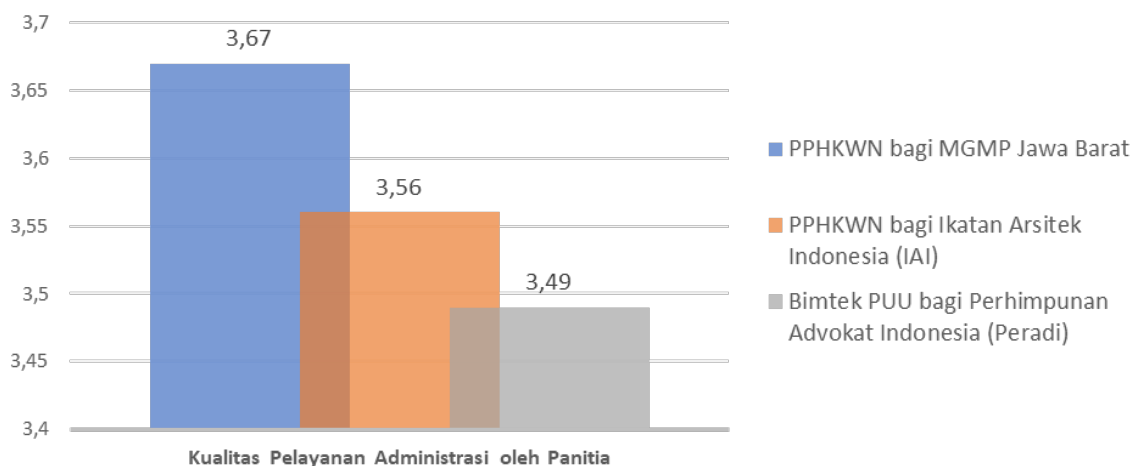
Tabel 4. 8. Kualitas Pelayanan Administrasi oleh Panitia

No	Nama Kegiatan	Nilai Rata-Rata	Kategori
1	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Forum Komunikasi MGMP PPKN Jawa Barat	3,67	Sangat Baik
2	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)	3,56	Sangat Baik
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	3,49	Sangat Baik
Rata-Rata		3,57	Sangat Baik

Sumber Data: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik 4. 7. Kualitas Pelayanan Administrasi oleh Panitia



4.4. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana

4.4.1. Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan

Nilai rata-rata Kualitas Sarana dan Prasarana adalah 3,60 atau sama dengan nilai “**sangat baik**”. Dari 3 kegiatan yang disurvei sepanjang tahun 2020, pada Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Pusdik MK mendapatkan nilai Kualitas Sarana dan Prasarana paling rendah menurut peserta yaitu 3,49 atau sama dengan nilai “**sangat baik**”. Sementara nilai Kualitas Sarana dan Prasarana paling tinggi menurut peserta yaitu 3,77 atau sama dengan nilai “**sangat baik**” pada pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi MGMP Jawa Barat. Adapun hasil jawaban kuesioner Kualitas Sarana dan Prasarana setiap kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.

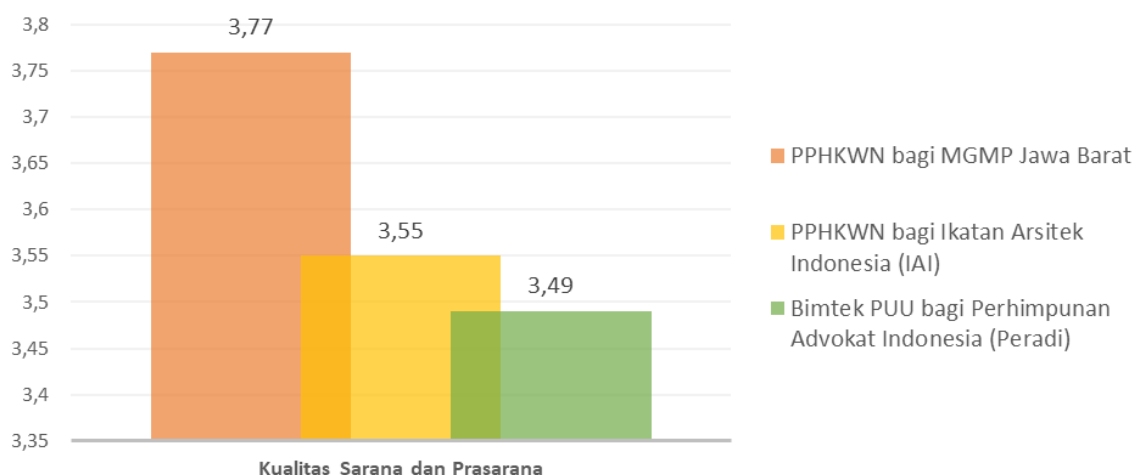
Tabel 4. 9. Kualitas Sarana dan Prasarana Selama Tahun 2020

No	Nama Kegiatan	Nilai Rata-Rata	Kategori
1	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Forum Komunikasi MGMP PPKN Jawa Barat	3,77	Sangat Baik
2	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)	3,55	Sangat Baik
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	3,49	Sangat Baik
Rata-Rata		3,6	Sangat Baik

Sumber Data: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik 4. 8. Kualitas Sarana dan Prasarana Selama Tahun 2020



4.4.2. Kualitas Jamuan Makanan

Nilai rata-rata Kualitas Jamuan Makanan adalah 3,18 atau sama dengan nilai “baik”. Dari 3 kegiatan yang disurvei sepanjang tahun 2020, pada Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi MGMP Jawa Barat, Pusdik MK mendapatkan nilai Kualitas Sarana dan Prasarana paling rendah menurut peserta yaitu 2,93 atau sama dengan nilai “baik”. Sementara nilai Kualitas Sarana dan Prasarana paling tinggi menurut peserta yaitu 3,31 atau sama dengan nilai “baik” pada pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Adapun hasil jawaban kuesioner Kualitas Jamuan Makanan setiap kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.

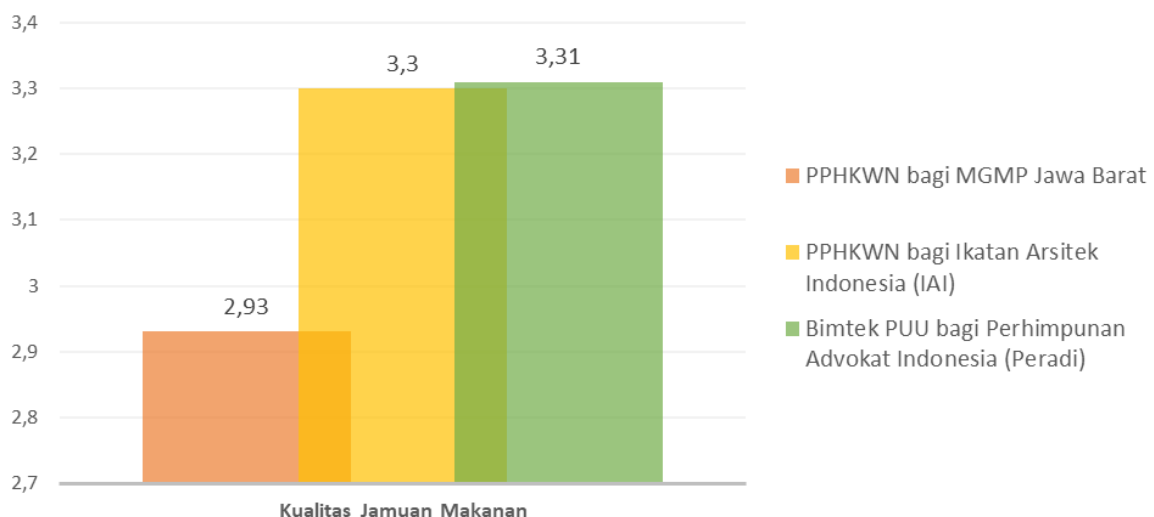
Tabel 4. 10. Kualitas Jamuan Makanan Selama Tahun 2020

No	Nama Kegiatan	Nilai Rata-Rata	Kategori
1	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Forum Komunikasi MGMP PPKN Jawa Barat	2,93	Baik
2	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)	3,3	Baik
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	3,31	Baik
Rata-Rata		3,18	Baik

Sumber Data: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik 4. 9. Kualitas Jamuan Makanan Selama Tahun 2020



4.2.3. Kualitas Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pendidikan

Nilai rata-rata Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pendidikan adalah 3,66 atau sama dengan nilai “**sangat baik**”. Dari 3 kegiatan yang disurvei sepanjang tahun 2020, pada Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Pusdik MK mendapatkan nilai Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pendidikan paling rendah menurut peserta yaitu 3,51 atau sama dengan nilai “**sangat baik**”. Sementara nilai Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pendidikan paling tinggi menurut peserta yaitu 3,78 atau sama dengan nilai “**sangat baik**” pada pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi MGMP Jawa Barat. Adapun hasil jawaban kuesioner Kualitas Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pendidikan setiap kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.

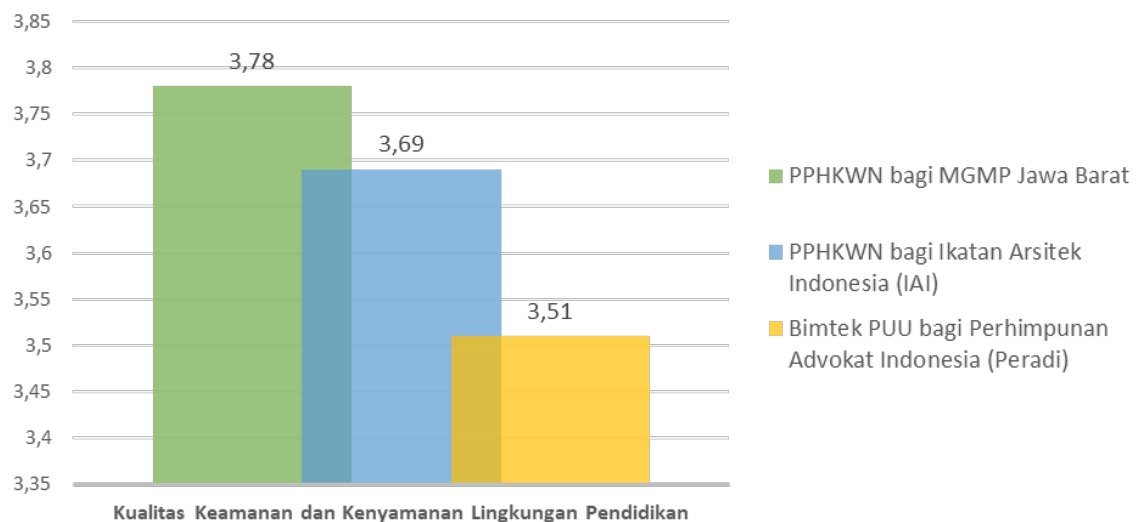
Tabel 4. 11. Kualitas Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pendidikan

No	Nama Kegiatan	Nilai Rata-Rata	Kategori
1	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Forum Komunikasi MGMP PPKN Jawa Barat	3,78	Sangat Baik
2	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)	3,69	Sangat Baik
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	3,51	Sangat Baik
Rata-Rata		3,66	Sangat Baik

Sumber Data: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik 4. 10. Kualitas Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pendidikan



4.5. Saran, Kritik, dan Komentar dari Peserta Pendidikan

Dalam survei peserta pendidikan diberikan 1 pertanyaan terbuka untuk menjangking kritik dan saran agar penyelenggara pendidikan mendapatkan input yang objektif untuk perbaikan ke depan. Berikut adalah rekapitulasi saran, kritik, dan komentar yang didapat dari survei:

Tabel 4. 12. Saran, Kritik, dan Komentar Peserta Pendidikan

No	Kritik, Saran, dan Komentar Peserta Pendidikan	Tindak Lanjut
Kurikulum, Materi, dan Pengacaraan		
1	Memperbanyak diskusi, studi kasus dan terapan	Pusdik MK sudah mendesign urutan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kurikulum, dimana materi yang bersifat teoritis disampaikan diawal, dan kemudian diikuti oleh materi tentang pemahaman teknis dan praktek serta disesuaikan dengan jam pembelajaran yang efektif.
2	Materi sangat menarik walaupun sangat berat untuk dipahami	
3	Meningkatkan penggunaan waktu pembelajaran	
4	Perhatikan waktu sholat	Saat ini sudah disesuaikan waktu ishoma mendekati dengan waktu sholat.
5	Melebihkan waktu untuk praktik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang	Untuk praktik pada Bimtek PUU, untuk advokat diberikan 3 sesi dan non advokat 2 sesi, hal tersebut sudah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kurikulum.
6	Untuk materi TIK perlu kombinasi dari programmer dan panitera	Materi yang diberikan oleh TIK merupakan praktik teknis untuk pengajuan permohonan secara online/daring, sedangkan kepaniteraan bertanggungjawab untuk materi yang bersifat subtansi sudah disampaikan pada materi sebelumnya.
7	Lebih banyak <i>ice breaking</i>	Sudah dilaksanakan pada saat pergantian sesi pagi atau siang.

No	Kritik, Saran, dan Komentar Peserta Pendidikan	Tindak Lanjut
Sarana dan Pelayanan		
1	Sebaiknya disiapkan tissue wajah dan plastik laundry di kamar	Plastik Laundry pernah dilakukan untuk disediakan ke peserta, namun pengerjaan laundry terkadang melebihi batas waktu menginap peserta, dan penanganan laundry yang ditangani pihak ketiga membuat complain sulit untuk dilakukan evaluasi dan monitoring, tissue wajah akan dilakukan pertimbangan sebagai catatan evaluasi.
2	Menu makanan bisa lebih bervariasi	Pada saat tahun 2020 pemilihan menu dilakukan oleh panitia peserta karena menjadi tanggungan langsung oleh peserta dan diatur oleh panitia lokal.
3	Menambah stop kontak di kamar	Jumlah stok kontak ada 3 di kamar dirasakan cukup untuk keperluan peserta.
4	Menyediakan petugas payung ketika hujan	Penyediaan payung selalu dilakukan penambahan setiap tahunnya.
5	Aroma asrama sebaiknya diberi pewangi	Sudah dilakukan pembaruan rekanan untuk melakukan pekerjaan ini.
6	Sebaiknya diberi sign di ruang reception dengan jelas	Akan menjadi catatan evaluasi untuk dipertimbangkan.
7	Dibuat selasar antar bangunan agar tidak kehujanan	Sudah dilakukan perencanaan untuk melaksanakan hal ini, namun belum ditindak lanjuti terkait ketersediaan anggaran (rencana pembuatan <i>sky bridge</i> antar gedung).
8	Nama moderator perlu disebutkan dalam opsi pengisian kuesioner evaluasi kegiatan	Akan menjadi catatan sebagai evaluasi.
9	Ruang belajar diusahakan berbentuk meja bundar sehingga peserta dapat lebih aktif berdiskusi	Sudah dilakukan perencanaan untuk melaksanakan hal ini, namun belum ditindak lanjuti terkait ketersediaan anggaran (hal ini sudah menjadi catatan evaluasi dan masukan dari LAN dan saat ini menjadi catatan penting untuk dipertimbangkan).
10	Pada pagi hari, air mandi di salah satu kamar mandi tidak stabil	Akan menjadi catatan sebagai evaluasi.
11	Handuk diganti setiap hari	Akan menjadi catatan sebagai evaluasi.
12	Jam dinding dipastikan berfungsi	Akan menjadi catatan sebagai evaluasi.

4.6. Tindak lanjut Hasil Survei

Adapun berdasarkan hasil survei setiap komponen, dapat dijabarkan komponen survei yang mendapat penilaian terbaik dan terburuk ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 13. Peringkat Penilaian Komponen Survei Kepuasan Peserta Pendidikan di Pusdik Pancasila dan Kontitusi Tahun 2020

No	Ruang Lingkup	Nilai Rata-Rata	Kategori	Peringkat
1.	Kualitas Materi	3,47	Sangat Baik	6
2.	Metode Pendidikan	3,48	Sangat Baik	5
3.	Kesesuaian Materi Pendidikan dengan Kebutuhan Peserta	3,28	Baik	8
4.	Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pendidikan	3,57	Sangat Baik	3
5.	Kualitas Narasumber	3,52	Sangat Baik	4
6.	Kualitas Moderator	3,42	Sangat Baik	7
7.	Kualitas Pelayanan Administrasi oleh Panitia	3,57	Sangat Baik	3
8.	Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	3,6	Sangat Baik	2
9.	Kualitas Jamuan Makanan	3,18	Baik	9
10.	Kualitas Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pendidikan	3,66	Sangat Baik	1
Rata-Rata		3,47	Sangat Baik	

Berdasarkan tabel di atas, jika dilakukan penjumlahan dan dirata-rata, maka total sepuluh aspek yang dinilai, rata-rata indeks yang diperoleh adalah **3,47 (sangat baik)**. Jika dibandingkan di tahun 2019, dengan nilai **3,37 (Baik)**, terdapat peningkatan yang cukup signifikan dari tingkat kepuasan peserta terhadap layanan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa tiga Komponen Survei yang mendapat **penilaian tertinggi** dari peserta adalah:

- 1) Nilai 3,66 pada komponen penilaian Kualitas Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
- 2) Nilai 3,60 pada komponen penilaian Kualitas Sarana dan Prasarana;
- 3) Nilai 3,57 pada komponen penilaian Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pendidikan dan Kualitas Pelayanan Administrasi oleh Panitia.

Sementara itu, tiga Komponen Survei yang mendapat **penilaian terendah** dari peserta yaitu:¹

- 1) Nilai 3,18 pada komponen penilaian Kualitas Jamuan Makanan;
- 2) Nilai 3,28 pada komponen penilaian Kesesuaian Materi Pendidikan dengan Kebutuhan Peserta;
- 3) Nilai 3,42 pada komponen penilaian Kualitas Moderator.

Komponen pertama, **Kualitas Jamuan Makanan**, mendapat nilai 3,18 karena seluruh kegiatan yang disurvei pada tahun 2020 adalah kegiatan yang bersifat *sharing funding*. Hal ini berarti pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pendidikan akan ditanggung secara bersama-sama oleh kedua belah pihak. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, *seminar kit*, dan Narasumber. Sedangkan Pihak Kedua menyediakan transportasi, konsumsi, dan biaya kebersihan akomodasi peserta selama mengikuti kegiatan. Nilai kualitas jamuan makanan yang diberikan oleh peserta adalah penilaian mereka terhadap jasa *catering* yang disediakan oleh panitia organisasi masing-masing.

Terhadap penilaian **Kesesuaian Materi Pendidikan dengan Kebutuhan Peserta**, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah berusaha menyusun kurikulum pendidikan sesuai target group peserta, terutama pada sesi praktek penyusunan permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU). Ketika peserta kegiatan adalah anggota MGMP PPKn SMA, maka studi kasus yang diangkat adalah terkait bidang pendidikan, begitu juga dengan organisasi Ikatan Arsitek Indonesia maka studi kasus pada sesi praktek yaitu terkait bidang kearsitekan, serta mengeneralkan studi kasus ketika target organisasi Peradi. Namun, memang masih dibutuhkan perbaikan yang sifatnya menyeluruh agar timbul harmoni antara kebutuhan peserta, pelaksanaan pendidikan oleh penyelenggara dan kemampuan narasumber dalam menyajikan materi.

Terakhir, penilaian responden terhadap Kualitas Moderator. Secara kategoris, kualitas moderator di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dinilai baik oleh responden. Meskipun begitu, terdapat saran dan masukan yang dapat menjadi evaluasi dan cambuk penyemangat bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Adanya kritik dan saran tersebut, dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan pelatihan kepada seluruh pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi dalam meningkatkan kemampuan *public speaking* untuk meningkatkan performanya.

¹ Meskipun ketiga komponen tersebut tergolong ke dalam komponen terendah, secara rata-rata ketiganya masih termasuk kategori baik

5.1. Kesimpulan

Dari hasil Survei Kepuasan Peserta Pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Jumlah responden yang memberikan respons sebanyak 438 orang, dengan mayoritas responden 66,9% (293 orang) berjenis kelamin laki-laki, berlatar belakang pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 60% (263 orang), dan berasal dari Jawa Barat dengan 48,4% responden (212 orang).
- 2) Komponen pelayanan yang mendapat nilai terbaik yaitu kualitas keamanan dan kenyamanan lingkungan, kualitas sarana dan prasarana, ketepatan waktu penyelenggaraan pendidikan, dan kualitas pelayanan administrasi oleh panitia.
- 3) Komponen pelayanan yang perlu ditingkatkan yaitu kualitas jamuan makanan, kesesuaian materi pendidikan dengan kebutuhan peserta, dan kualitas moderator.
- 4) Seluruh saran dan komentar responden telah melalui proses monitoring dan evaluasi oleh penyelenggara sehingga saran dan komentar tersebut mayoritas sudah ditindaklanjuti oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

5.2. Rekomendasi

Penyelenggara sudah dan akan terus melengkapi sarana dan prasarana layanan kepada para peserta pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada beberapa kritik, saran, dan evaluasi yang disampaikan oleh peserta yang sudah terakomodir dan ditindaklanjuti oleh pihak penyelenggara. Namun demikian, di masa-masa akan datang, masih perlu ditingkatkan sarana, prasarana, maupun metodologi pembelajaran terkait masukan-masukan dari peserta.

Selain itu, kuesioner yang diisi oleh peserta pendidikan selama tahun 2020 perlu untuk dilakukan perbaikan dan penambahan pertanyaan-pertanyaan terkait indikator-indikator layanan publik yang belum terakomodir dalam pertanyaan kuesioner. Misalnya, pertanyaan terkait perilaku petugas ketika proses registrasi, kecepatan waktu yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan, kemudahan prosedur pelayanan, dan pelayanan pengaduan terkait pengguna layanan.



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS

20/2600/07/2020

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2020 perlu adanya Tim Penyusun Laporan dalam kegiatan tersebut;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu penetapan surat tugas penunjukkan Tim Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf *a*.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memberi Tugas:

- Kepada : **Nama Terlampir**
- Untuk : Melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Semester I Tahun 2020
- Waktu : Januari s.d. Desember 2020
- Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM.83, Cisarua, Bogor, Jawa Barat
- Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono



Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono - NIP. 19690331 198912 1 001

Digital Signature
[mk229106084200727113122](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Lampiran Surat Tugas
Nomor : 20/2600/07/2020
Tanggal: 27 Juli 2020

**Tim Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan
di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2020**

1. Ardiansyah Salim : Ketua Tim Penyusun
2. Hatika Al Shafa : Penulis
3. Ganggas Wibisono : Penulis
4. Bangkit Panji Anarogo : Penulis
5. Santhy Kustrihardiani : Pengolah Data
6. Angga Putri Gardina : Pengolah Data
7. Fazlur Rahman El Islamy : Pengolah Data
8. Suhardi : Pengolah Data
9. Melati Kusuma Wardhani : Editor
10. Hadian Taofik Rohman : Editor



**Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi**

Jl. Raya Puncak KM.83, Cisarua, Kab. Bogor
Telp : (021) 2352 9000 ext. 18979 | Email : pusdik@mkri.id